

MENYULAM HARAPAN DARI HUTAN Catatan Pendampingan Penyusunan RKPS di Kampung Haha

ARTIKEL LAINNYA

KONSULTASI PUBLIK DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI dan Hutan Lindung di Papua

PROVINSI KALIMANTAN BARAT PRESENTASIKAN Perkembangan Proposal GCF di Pavilion Indonesia pada COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab

MENDUKUNG PEKAN PROMOSI BUDIDAYA ANGGREK ENDEMIK di Taman Nasional Wasur, Papua Selatan

Editorial

Newsletter FORCLIME edisi Januari 2024 ini menghadirkan sorotan tentang proses pendampingan dalam penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) di kampung dampingan yang berada di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, kami memfokuskan edisi ini pada pentingnya pendampingan dalam Program Perhutanan Sosial di Tanah Papua. Tantangan signifikan yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah pendamping yang berkualitas. Di Papua Barat saat ini ada sekitar 22 pendamping, sedangkan di Provinsi Papua, dari 17 yang direncanakan, baru tiga yang tersedia.

Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan usaha perhutanan sosial, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Maluku dan Papua bersama dengan program FORCLIME melaksanakan praktik kerja nyata untuk tenaga pendamping (fasilitator kampung) dalam penyusunan RKPS. Ini menjadi kunci sehingga masyarakat dapat menerjemahkan kearifan lokal dan potensi hutan menjadi peluang ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha yang berfokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah.



Kegiatan ini diadakan untuk kelompok perhutanan sosial di Kampung Haha, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, yang telah memperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan desa (hutan kampung). Upaya ini direncanakan untuk memperkuat kapasitas kelompok-kelompok perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal melalui kelompok usaha perhutanan sosial.

RKPS, yang dirancang untuk jangka pendek dan jangka panjang, mencerminkan strategi yang kuat untuk penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, kelola usaha, dan monitoring yang dipadukan dengan kebijakan jangka panjang. Pendampingan oleh FORCLIME sejak pertengahan 2023 berkontribusi pada kesuksesan penyusunan RKPS, membuktikan bahwa kampung binaan telah siap mengelola hutan sementara juga mendukung pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal.

Dengan adanya RKPS yang kuat, Kampung Haha dan kampung lainnya di Distrik Seremuk kini bersiap memasuki fase baru, dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan bertanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat

Mohammad Sidiq

Manajer bidang strategis pengelolaan hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Menyulam Harapan dari Hutan

Catatan Pendampingan Penyusunan RKPS di Kampung Haha

Laurensia Verina Mapandin, Advisor Junior bidang Rural Livelihood, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Rizky Rido, Fasilitator Kampung Haha

Refleksi Terhadap Kemajuan yang Berharga

Refleksi terhadap perjalanan panjang pemberdayaan masyarakat di Papua Barat Daya mengungkapkan dedikasi dari para pendamping/fasilitator kampung. Setelah hampir tiga tahun usaha gigih, kemajuan signifikan dapat dilihat di Kampung Haha dan Kampung Wendi. Dukungan erat dari KPHP Sorong Selatan dan BPSKL Maluku Papua Seksi II telah membuahkan pencapaian penting pada tahun 2023—suatu kemajuan berharga dimana Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari kedua kampung berhasil menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS). Mengapa tidak, RKPS menjadi instrumen strategis yang mendukung produktivitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan, serta menjamin keberlanjutan mereka melalui peningkatan kapasitas mereka dalam pengelolaan hutan kampungnya.

RKPS tidak sekadar dokumen, tetapi merupakan kerangka kerja yang memberdayakan kelompok tani hutan (KTH) sebagai pemegang hak pengelolaan untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, memperteguh kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Langkah ini disongsong dengan antusias dan kesadaran yang tinggi oleh anggota KTH akan pentingnya aksi kolektif untuk masa depan yang

mandiri dan lebih cerah, sesuai dengan cita-cita perhutanan sosial. Dengan semangat yang dinamis dan tanggung jawab bersama, mereka bertekad untuk membawa rencana kerja ke arah keberhasilan yang konkret.

RKPS, oleh karena itu, menjadi simbol dari komitmen KTH dan LPHD menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Catatan lapangan dari Rizky Rido, pendamping KTH di Kampung Haha, menceritakan proses pembelajaran masyarakat lokal yang membangun masa depan mereka dengan memanfaatkan perhutanan sosial sebagai sarana untuk tidak hanya menjaga hutan kampungnya tetapi juga memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Perhutanan sosial telah menjadi jembatan yang menghubungkan kelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi, memberikan KTH alat dan otoritas untuk mengelola sumber daya hutan mereka secara berkelanjutan. Dukungan dari program Perhutanan Sosial memperkuat upaya masyarakat dalam pengelolaan yang lestari, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Inilah esensi dari kemajuan yang tidak hanya diukur melalui *output*, melainkan juga melalui dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat—sebuah cerminan nyata dari kemajuan yang berharga dan berkesinambungan.

Penyusunan RKPS Kampung Haha, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan



Keniscayaan Pendampingan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pada intinya, Perhutanan Sosial adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan. Sejak 2015, menargetkan sekitar 12,7 juta hektare area hutan negara yang diberikan akses kelola kepada masyarakat. Meski demikian, banyak tantangan dari proses perizinan hingga pengembangan usaha berbasis hutan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pendampingan oleh pemerintah, lembaga, dan para ahli penting untuk mengatasi tantangan ini dan membuka potensi akses terhadap hutan. Contohnya di Kampung Haha, Papua Barat Daya, dimana pendampingan oleh fasilitator seperti Rizky Rido dalam menyusun rencana kerja perhutanan sangat berdampak. Hal ini memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan partisipasi

mereka, merawat hutan, dan menciptakan inovasi bisnis. Pendampingan telah terbukti fundamental dalam memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi manusia dan alam.



Pendampingan Langkah Demi Langkah: Penyusunan RKPS

Di bulan Juli 2023, Kampung Haha menjadi pusat kegiatan penyusunan RKPS, terinspirasi oleh potensi sumber daya alam dan bakat masyarakat lokal untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kampung-kampung lain dari Distrik Seremuk seperti Boldon, Manggaroholo, Sira, Sasnek, dan Woloin juga ikut serta. Fasilitator kampung, yang pengetahuannya diasah melalui sosialisasi oleh BPSKL Maluku Papua Seksi II dan bimbingan teknis dari FORCLIME, berperan penting dalam mengarahkan anggota masyarakat kampung dalam proses ini.

Penyusunan dilakukan melalui lima tahapan strategis untuk efektivitas dan berkelanjutan. Selesaiannya tahapan ini menandai siapnya RKPS untuk diimplementasikan di Kampung Haha dan kampung lain, dengan tujuan mengelola hutan dengan lebih bijak dan meningkatkan kesejahteraan. Fasilitator akan terus memonitor dan mendukung implementasi, menjamin bahwa praktik terbaik RKPS diikuti dan tujuan yang diharapkan tercapai.

1. Pra-Pelaksanaan: Pembentukan Tim Kerja

Tahap persiapan ini fokus pada membentuk Tim Kerja. Tim ini akan bekerja dan bertanggung jawab untuk mengarahkan serta mengoordinasikan seluruh proses penyusunan RKPS, mulai dari fase perencanaan hingga implementasi. Pembentukan tim ini melibatkan pemilihan anggota, penentuan peran, dan pembekalan awal untuk memastikan setiap anggota tim memahami tujuan dan dapat bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penetapan RKPS.



Kedua foto: Pemetaan potensi wilayah kelola Kampung Haha bersama tim dari BPSKL Maluku Papua Seksi II

2. Sosialisasi dan Pembelajaran

Tahap ini adalah langkah yang sangat penting, fokus pada transfer pengetahuan dan sosialisasi proses penyusunan RKPS kepada KTH/LPHD. Tenaga pendamping, staf/personel KPH, dan anggota KTH/LPHD mendapatkan informasi tentang regulasi, *best practices*, dan metodologi yang relevan untuk mempersiapkan KTH/LPHD dalam menyusun RKPS. Para pendamping kemudian mentransfer ilmu ini kepada anggota KTH/LPHD melalui sesi interaktif dan diskusi.

3. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah

Dalam fase identifikasi, fasilitator kampung, bersama dengan BPSKL, KPH, dan FORCLIME, mengumpulkan masukan dari warga Kampung Haha untuk mengetahui kebutuhan dan kendala mereka. Pertemuan terbuka memungkinkan ekspresi kebutuhan spesifik dan isu kritis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Informasi ini vital dalam mengadaptasi pendekatan berbasis lokal dan membentuk tahap selanjutnya: pemetaan wilayah LPHD. Pemetaan dipandu oleh BPSKL, mencatat koordinat dan menilai potensi sumber daya alam, dengan tujuan untuk mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kampung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

4. Penyusunan Draft RKPS

Pembuatan draft RKPS merupakan proses kolaboratif antara pendamping, Kelompok Tani Hutan, dan Lembaga Pengelola Hutan Desa, dibangun berdasarkan data, analisis lokal, dan

aspirasi Kampung Haha. BPSKL Seksi II dan FORCLIME bersama Tim KPH memberikan pendampingan teknis, memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan hutan lestari dan mendukung tujuan pembangunan desa secara holistik. Draft RKPS yang komprehensif ini menampilkan rencana aksi yang realistis, jadwal yang terorganisir, produksi yang jelas, dan strategi pemasaran yang efektif. Komitmen bersama para *stakeholder* menghasilkan dokumen yang menjadi fondasi untuk pencapaian inklusif dan berkelanjutan hutan kampungnya.

5. Validasi dan Pengesahan

Tahap akhir dalam penyusunan RKPS ini melibatkan peninjauan kembali draft yang telah disusun. Berdasarkan umpan balik yang diterima selama uji coba lapangan, para pendamping KTH/LPHD bekerja sama dengan BPSKL, KPH, dan FORCLIME untuk merevisi dan menyempurnakan dokumen. Hal ini termasuk penyesuaian rencana berdasarkan realitas di lapangan, integrasi kelestarian ekologi dengan pertumbuhan ekonomi lokal, serta evaluasi dampak sosial dari usulan kegiatan. Akhirnya, RKPS yang telah disempurnakan akan disahkan dan siap untuk diimplementasikan dengan tujuan berkelanjutan dan inklusif. Setiap tahapan didesain untuk memastikan bahwa RKPS yang dihasilkan dapat diandalkan sebagai panduan efektif dalam pengelolaan hutan desa secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.



Kedua foto atas: Penyusunan RKPS 7 LPHD Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan; Kedua foto Bawah: *Coaching clinic* pembuatan teh gaharu dan pengemasan madu.





Pembuatan teh daun gaharu di Kampung Haha.

IMPAK PENDAMPINGAN RKPS TERHADAP SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Impak positif pendampingan RKPS terhadap sosial budaya masyarakat lokal sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan selaras dengan adat istiadat setempat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola hutan, memperkaya pengetahuan tradisional dengan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Proses ini melahirkan struktur kerja kolektif yang meningkatkan peluang ekonomi masyarakat, seperti pemanfaatan kekayaan biodiversitas lokal yang meliputi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti anggrek, sumber daya seperti rotan, dan potensi ekowisata seperti Kali Biru dan gua-gua. Warga masyarakat menjadi lebih berdaya, proses pembuatan keputusan menjadi inklusif, dan distribusi keuntungan menjadi lebih adil. Pemberian hak eksklusif pengelolaan hasil hutan melalui Surat Keputusan Menteri telah menguatkan hak masyarakat atas sumber daya mereka.

Penyusunan RKPS yang partisipatif juga mendukung kelompok usaha PS dalam merencanakan dan memprediksi modal serta profitabilitas pengelolaan hutan, meningkatkan ketangguhan dan kemampuan kelompok dalam beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, RKPS yang efektif mengarah pada pengelolaan hutan yang lebih efisien dan menopang kemajuan ekonomi di tingkat kampung. Ini inklusif penerimaan yang lebih luas di antara anggota kelompok tentang keuntungan berpartisipasi dalam kegiatan perhutanan sosial, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan dan peran mereka yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi sosial.

Kegiatan ini telah berhasil menciptakan sinergi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan persepsi positif terhadap nilai sumber daya alam. Ini membantu masyarakat untuk memahami manfaat jangka panjang dari pengelolaan hutan yang lestari dan menghargai pentingnya melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Masyarakat Kampung Haha dan kelompok usaha PS lainnya di Distrik Seremuk mengalami efek pemberdayaan dari pendampingan RKPS, di mana pendidikan komunitas dan pengembangan keterampilan berjalan paralel dengan kegiatan konservasi.

Pendampingan RKPS telah menunjukkan bagaimana pendekatan yang partisipatif dapat mengubah sosial-budaya dan ekonomi lokal secara positif dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat identitas sosial, dan mendorong kesejahteraan bersama. Ini telah membantu masyarakat Kampung Haha dan sekitarnya mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab bersama atas hutan dan sumber daya alamnya, menyatukan komunitas untuk bekerja bersama membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Adapun tantangan yang perlu diwaspadai adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan *multistakeholders* dalam RKPS menjamin bahwa berbagai kepentingan dan harapan masyarakat dapat diakomodasi, memperkuat tata kelola sumber daya hutan yang inklusif dan partisipatif.

MENAVIGASI PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENYUSUNAN RKPS:

- **Mencapai Pemahaman Bersama**

Dalam proses penyusunan RKPS, tantangan yang sering muncul adalah beragamnya perspektif dan pendapat yang dimiliki oleh anggota masyarakat tentang bagaimana wilayah kelola seharusnya dikelola. Perbedaan pendapat ini menjadi suatu tantangan yang harus diatasi pada setiap tahapan RKPS. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan selama proses ini seringkali diwarnai oleh diskusi yang intens mengenai pengelolaan wilayah.

Sebuah tahapan kritical dalam proses ini adalah peningkatan pemahaman kolektif mengenai pentingnya pengaturan wilayah kelola dan bagaimana hal itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, adanya individu atau pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mekanisme perhutanan sosial menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan pendapat dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Mereka memainkan peran penting dalam menjelaskan fungsi dan tujuan dari wilayah kelola, menggiring masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan, pada akhirnya, konsensus.

Ini adalah proses interaktif yang melibatkan pendidikan dan komunikasi efektif agar semua pihak, terutama mereka yang memiliki opini berlawanan atau kekhawatiran tertentu, dapat memahami keseluruhan visi dan mendukung rencana yang diusulkan. Dengan demikian, penyusunan RKPS bukan hanya

mencakup aspek teknis, tetapi juga pembinaan hubungan dan pemahaman antar masyarakat agar menghasilkan strategi yang inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- **Potensi Skalabilitas**

Skalabilitas inisiatif RKPS di Kampung Haha, Distrik Seremuk, menjanjikan penyebaran model perhutanan sosial yang sukses ke distrik lain pascapersetujuan. Keterlibatan anggota masyarakat dengan dialog yang komprehensif memastikan adaptasi konteks lokal, menggarisbawahi pentingnya pembelajaran untuk pengelolaan hutan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Penyusunan RKPS yang partisipatif meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

Kerja sama yang terbina antara berbagai mitra kerja, mulai dari instansi pemerintah hingga aparat desa, menjadi titik kuat dalam mendukung kegiatan penyusunan RKPS. Kolaborasi ini bisa sangat efektif dalam menangani tantangan yang muncul selama proses penyelenggaraan kegiatan, termasuk ketika diperlukan adaptasi oleh masyarakat dan kelembagaan setempat. Hubungan sinergis ini memfasilitasi pertukaran sumber daya dan informasi, serta memperkuat kapasitas adaptasi untuk mengatasi hambatan budaya atau logistik yang mungkin dihadapi dalam proses skalabilitas.



Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Papua

Dalam rangka penyempurnaan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lintas Sarmi-Memberamo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Biak Numfor, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Papua mengadakan konsultasi publik pada tanggal 11 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat Percepatan Penyusunan RPHJP pada KPH Lingkup Provinsi Papua yang telah dilakukan pada bulan November 2023. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala BPHL Wilayah XV Papua, Safrudin Jen, S.Hut., MM., dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kepala Seksi Wilayah III Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Lembaga Masyarakat Adat Sarmi, PT. BBU (Bina Balantak Utama), FORCLIME, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Provinsi Papua.



Hasil dari konsultasi publik ini akan melengkapi dokumen RPHJP dari KPHP Lintas Sarmi-Memberamo dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Biak Numfor, yang kemudian akan dikirimkan ke Sistem Informasi RPHJP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Anna Manyakori**, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Provinsi Kalimantan Barat Presentasikan Perkembangan Proposal GCF di Pavilion Indonesia pada COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab

Conference of Parties (COP) 28 United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) tahun 2023 dilaksanakan mulai 30 November hingga 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Konferensi Perubahan Iklim yang membahas isu-isu perubahan iklim diselenggarakan tiap tahun. Delegasi dari hampir seluruh dunia hadir, mulai dari perwakilan negara-negara anggota, ilmuwan, pebisnis, masyarakat adat, jurnalis, dan para ahli serta para pihak terkait lainnya.

Setiap tahun Indonesia melakukan *soft diplomacy* melalui penyelenggaraan Pavilion Indonesia selama COP berlangsung. Melalui Pavilion Indonesia ini ditampilkan aksi-aksi iklim (*climate actions*) yang telah dilakukan di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat madani lainnya.

Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Barat turut hadir mempresentasikan perkembangan proposal pendanaan iklim dari Global Climate Fund (GCF). Pj Gubernur Kalimantan Barat, Bapak dr. Harisson, MPH., menyampaikan komitmen kuat provinsi untuk implementasi pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan tata kelola sumber daya alam dan program terkait aksi perubahan iklim. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, GIZ, PT. Kandelina Alam dan Universitas Pertahanan Nasional. Bapak Wandojo Siswanto, Advisor Senior bidang Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim FORCLIME



(program kerja sama Pemerintah Federal Jerman dan RI untuk bidang hutan dan perubahan iklim) menyampaikan mengenai kolaborasi dan peran GIZ dalam mendukung Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun proposal untuk pendanaan iklim dari CGF.

Kehadiran dalam Pavilion Indonesia pada COP28 ini menjadi bukti kerja sama dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan para pihak dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencapaian target NDC dan FoLU Net Sink 2030.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Jumtani**, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF Kalbar
2. **Wandojo Siswanto**, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Mendukung Pekan Promosi Budidaya Anggrek Endemik di Taman Nasional Wasur, Papua Selatan

Dalam rangka mendorong pengelolaan hutan lestari dengan kerangka pemberdayaan ekonomi yang terarah, Balai Taman Nasional Wasur, didukung FORCLIME, menyelenggarakan Pekan Promosi Budidaya Anggrek Endemik Wasur pada tanggal 8 – 9 Desember 2023 di Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tujuan penyelenggaraan Pekan Promosi Anggrek Wasur selain mempromosikan tanaman anggrek budidaya yang dikembangkan oleh Komunitas Bualas sebagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mempunyai nilai jual tinggi dalam mendukung peningkatan perekonomian keluarga, juga untuk mendukung pertukaran pengetahuan pengembangan budidaya anggrek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di Kawasan Taman Nasional Wasur.

Pekan Promosi Anggrek ini tidak hanya menjadi ajang pengenalan anggrek merauke, namun juga menjadi media komunikasi untuk membahas berbagai peluang dan tantangan dalam upaya melestarikan anggrek sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat yang telah lama menggeluti usaha ini, yaitu

Komunitas Bualas. Diskusi tersebut diadakan pada hari pertama, dengan menampilkan pembicara bapak Yarman, S.Hut., M.P selaku Kepala Balai Taman Nasional Wasur, dengan topik Pentingnya Menjaga Kelestarian Anggrek Wasur. Selain itu bapak Benhur Rentandantu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, menyampaikan tema Peluang Ekonomi Anggrek Wasur sebagai Destinasi Wisata. Hasil dari diskusi tersebut adalah:

1. **Pengelolaan anggrek** sebagai potensi ekonomi bagi masyarakat di Kampung Wasur tetap dapat diupayakan melalui perizinan pada Zona Khusus Taman Nasional,
2. **Upaya promosi tanaman anggrek** dilakukan dengan melihat peluang pasar yang saat ini cukup tinggi,
3. **Upaya pemanfaatan tanaman anggrek** untuk meningkatkan ekonomi pada kawasan konservasi dilakukan sesuai tata cara perizinan yang berlaku agar kelestariannya dapat terjaga.

Melalui kegiatan Pekan Promosi Budidaya Anggrek Wasur diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dari hasil budidaya. Selain itu, meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat Merauke dalam menjaga dan melestarikan tumbuhan di kawasan Taman Nasional Wasur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Rut M Ohoiwutun**, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de